PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA MELALUI PENDAMPINGAN USAHA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM KERAJINAN SABUT KELAPA DI KALURAHAN SENDANGSARI, KAPANEWON PENGASIH, KABUPATEN KULON PROGO

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh :

ROSI PRATIWI

22314513

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

2026

ABSTRACT

Agrarian reform in Indonesia is not only aimed at restructuring land ownership (asset reform), but also at strengthening economic access (access reform) to improve community welfare. One form of access reform is business assistance for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through capacity building, market access development, and preparation for financing access. This research aims to: (1) analyze the implementation of access reform through business assistance for coconut coir handicraft MSMEs in Sendangsari Village, Pengasih District, Kulon Progo Regency; (2) analyze the achievements of business assistance in improving business capacity, market access, and readiness for financing access; and (3) identify the constraints and follow-up needs in realizing MSME independence.

This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, documentation and literature review. The collected data were analyzed using the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the implementation of access reform has been carried out through preparation, implementation, and evaluation stages involving the Land Office of Kulon Progo Regency, the Sendangsari Village Government related government agencies, the private sector and MSME actors. Business assistance included entrepreneurship training, business management, financial management, product marketing, business legalization, product innovatio and the provision of production equipment through the Corporate Social Responsibility (CSR) program. The program succeeded in improving the knowledge, skills and production capacity of MSME actors, as well as increasing their readiness to access financing. However, market access remains limited due to the suboptimal utilization of digital marketing, while capital constraints, raw material availability, labor shortages, and limited business networks continue to hinder business development. Therefore sustainable collaboration among government institutions, financial institutions, universities and the private sector is essential to strengthen MSME independence and ensure the sustainability of agrarian reform access reform programs.

Keywords : Agrarian Reform, Access Reform, Business Assistance, Community Empowerment, MSMEs, Coconut Coir Handicrafts.

DAFTAR ISI

Halaman

SKRIPSI ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
ABSTRACT ..... **xi**
INTISARI ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
BAB II **12**
TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Kajian Literatur 12
B. Kerangka Teoritis 19
C. Kerangka Berpikir 26
BAB III **30**
METODE PENELITIAN **30**
A. Format Penelitian 30
B. Lokasi Penelitian 31
C. Jenis, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 35
D. Informan Penelitian 38

E. Populasi..... 39
F. Teknik Analisis Data 39
BAB IV..... 41
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 41
A. Kondisi Geografis Kabupaten Kulon Progo 41
B. Kondisi Geografis dan Wilayah Kalurahan Sendangsari 42
C. Gambaran Umum Pelaksanaan Reforma Agraria dan Pendampingan Usaha 48
D. Potensi Kerajinan Sabut Kelapa Di Kalurahan Sendangsari 53
BAB V 56
HASIL & PEMBAHASAN 56
A. Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria Melalui Pendampingan Usaha pada UMKM Kerajinan Sabut Kelapa di Kalurahan Sendangsari 56
B. Capaian Pendampingan Usaha Dalam Meningkatkan Kapasitas Usaha, Akses Pasar Dan Kesiapan Akses Permodalan Pelaku Umkm 76
C. Kendala Pelaksanaan Pendampingan Usaha Dan Kebutuhan Tindak Lanjut Dalam Mewujudkan Kemandirian Umkm..... 87
BAB VI..... 92
PENUTUP 92
A. Kesimpulan..... 92
B. Saran 94
DAFTAR PUSTAKA 96
LAMPIRAN 101

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma agraria merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dalam perspektif pembangunan, reforma agraria tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan redistribusi tanah atau penataan aset (*asset reform*), tetapi juga mencakup penataan akses (*access reform*) yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan reforma agraria sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam memastikan bahwa masyarakat penerima manfaat mampu memanfaatkan aset tanah secara produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan akses ekonomi menjadi bagian penting dalam implementasi reforma agraria modern, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang didukung melalui peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan perluasan jaringan pemasaran sehingga reforma agraria tidak berhenti pada aspek legalitas kepemilikan tanah semata, tetapi juga mendorong transformasi sosial ekonomi masyarakat pedesaan (Waryanta, 2016); Chambers, 2014)

Secara normatif penguatan penataan akses telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa reforma agraria diarahkan untuk menciptakan ekonomi berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses Perpres, (2023). Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya agraria harus digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun demikian dalam praktiknya masih ditemukan ketimpangan antara tujuan normatif dan implementasinya di lapangan, dimana reforma agraria cenderung berhenti pada tahap legalisasi aset tanpa diikuti penguatan akses ekonomi yang memadai sehingga manfaat ekonomi yang diterima masyarakat belum optimal (Arnowo, 2025).

Pelaksanaan Program Penataan Akses Reforma Agraria dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap awal diawali dengan penetapan lokasi program berdasarkan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat, selanjutnya dilakukan pemetaan sosial (*social mapping*) untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, potensi sumber daya lokal, jenis usaha yang berkembang serta berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hasil pemetaan sosial kemudian menjadi dasar dalam menentukan kelompok sasaran dan menyusun bentuk pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara tepat sasaran.

Berdasarkan hasil pemetaan sosial tersebut salah satu potensi ekonomi yang dinilai layak untuk dikembangkan adalah UMKM kerajinan sabut kelapa di Kalurahan Sendangsari, kelompok usaha ini dipilih karena memanfaatkan potensi lokal berupa limbah sabut kelapa yang diolah menjadi produk bernilai ekonomi serta memiliki peluang untuk dikembangkan melalui peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, dan penguatan akses permodalan. Oleh karena itu pelaksanaan penataan akses diwujudkan dalam bentuk pendampingan usaha yang meliputi pelatihan, penguatan manajemen usaha, fasilitasi legalitas usaha, pendampingan pemasaran serta penguatan akses terhadap lembaga pembiayaan. Setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan usaha, perubahan kapasitas pelaku UMKM serta berbagai kendala yang masih dihadapi. Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penataan akses reforma agraria tidak hanya berorientasi pada pemberian akses ekonomi tetapi juga pada proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan kemandirian pelaku UMKM.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya persoalan mendasar dalam implementasi reforma agraria yaitu belum optimalnya integrasi antara penataan aset dan penataan akses. Padahal tanpa dukungan akses ekonomi yang memadai kepemilikan aset tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam konteks ini penataan akses menjadi kunci keberhasilan reforma agaraia karena berfungsi sebagai instrumen transformasi dari kepemilikan aset menuju peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk konkret penataan

akses adalah melalui pendampingan usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi lokal. Namun berbagai studi menunjukkan bahwa UMKM masih menghadapi permasalahan struktural, terutama dalam hal keterbatasan akses permodalan dan akses pasar yang menjadi faktor utama penghambat pertumbuhan usaha (Haikal dkk., 2025).

Keberhasilan program reforma agraria tidak hanya ditentukan oleh penataan aset tetapi juga oleh keberlanjutan pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Dalam banyak kasus, masyarakat yang telah memperoleh legalitas aset masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan taraf hidup karena belum memiliki kapasitas usaha yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan aset tanpa penguatan kapasitas ekonomi hanya akan menghasilkan perubahan administratif bukan perubahan kesejahteraan secara substantif. Oleh karena itu, integrasi antara penataan aset dan penataan akses menjadi pendekatan yang penting untuk memastikan bahwa reforma agraria mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Ahfan dkk., 2015).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM menjadi salah satu strategi yang relevan dalam mendukung keberhasilan penataan akses reforma agraria. UMKM memiliki karakteristik yang dekat dengan masyarakat pedesaan karena mampu memanfaatkan sumber daya lokal, menyerap tenaga kerja keluarga, serta menciptakan peluang ekonomi berbasis komunitas. Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai sektor ekonomi produktif tetapi juga sebagai instrumen pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu penguatan UMKM melalui pendampingan usaha, fasilitasi akses pasar, dan akses permodalan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima reforma agraria (Arnita & Yustati, 2024).

Permasalahan akses permodalan menjadi isu krusial karena sebagian besar pelaku UMKM belum mampu mengakses lembaga keuangan formal akibat keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, serta prosedur administrasi yang kompleks. Akibatnya pelaku UMKM cenderung bergantung pada pembiayaan infomal yang tidak stabil dan beresiko tinggi, kondisi ini menunjukkan bahwa aspek

permodalan masih menjadi titik lemah dalam pemberdayaan UMKM (Soebiantoro & Haryanti, 2024). Di sisi lain akses permodalan merupakan faktor penting dalam mendukung keberlanjutan usaha UMKM. Modal usaha memungkinkan pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas jangkauan pemasaran. Namun pada kenyataannya banyak pelaku UMKM masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan administrasi, rendahnya kemampuan manajerial, dan minimnya jaminan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM kesulitan mengembangkan usaha secara optimal sehingga pertumbuhan usaha cenderung berjalan lambat. Oleh karena itu diperlukan pendampingan yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mampu menjembatani hubungan antara pelaku UMKM dengan lembaga pembiayaan yang relevan (Saleh & Utomo, 2018).

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal UMKM berbasis sumber daya alam memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Pemanfaatan bahan baku lokal tidak hanya mampu menciptakan peluang usaha baru tetapi juga dapat meningkatkan nilai tambah komoditas yang sebelumnya kurang dimanfaatkan. Kerajinan sabut kelapa menjadi salah satu bentuk usaha kreatif yang memiliki peluang pasar cukup luas karena produk yang dihasilkan dapat digunakan sebagai perlengkapan rumah tangga, dekorasi, maupun kebutuhan pertanian. Pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal tersebut menjadi penting karena mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara mandiri (Nontji dkk., 2022).

Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal yang cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 mencapai sekitar 447 ribu jiwa dengan dominasi usia produktif. Namun demikian tingkat kemiskinan di wilayah ini masih tergolong tinggi yaitu sekitar 15,62% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang dimiliki belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan strategi pemberdayaan

yang lebih efektif termasuk melalui penguatan UMKM berbasis potensi lokal BPS, (2024).

Dalam kerangka reforma agraria Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melaksanakan program penataan akses melalui pendampingan usaha bagi UMKM di Kalurahan Sendangsari program ini meliputi persiapan pendampingan, penguatan kerja sama dan penetapan model, pendampingan kewirausahaan dan pengembangan usaha, fasilitasi akses pemasaran serta sarana pendukung, penyusunan dan diseminasi akses reforma agraria, hingga tahapan pelaporan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut diharapkan subjek reforma agraria dapat mengoptimalkan potensi usaha yang dimiliki sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan per kapita sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Agararia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Laporan Akhir Fasilitasi Pendampingan Usaha Tahun 2025).

Pendampingan usaha dalam kerangka reforma agraria juga perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Pendekatan partisipatif memungkinkan program pendampingan lebih sesuai dengan kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan sehingga program yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, proses pendampingan dapat mendorong tumbuhnya inovasi usaha, kerja sama antar pelaku UMKM, serta peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Dengan demikian, keberhasilan penataan akses tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Chambers, 2014).

Bentuk pendampingan usaha dalam program penataan akses reforma agraria dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah pendampingan identifikasi potensi usaha dan pemetaan kebutuhan pelaku UMKM untuk mengetahui kondisi riil usaha masyarakat. Tahap kedua berupa pelatihan kewirausahaan yang mencakup pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, pengembangan produk, dan peningkatan kualitas produksi. Selanjutnya dilakukan fasilitasi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal dan izin edar produk agar UMKM memiliki daya saing yang lebih tinggi di

pasar formal. Selain itu pendampingan juga dilakukan melalui fasilitasi akses permodalan dengan menghubungkan pelaku usaha kepada lembaga keuangan, koperasi, maupun program kredit pemerintah sehingga pelaku UMKM memiliki peluang memperoleh pembiayaan usaha yang lebih stabil (Ahfan dkk., 2015).

Dalam perkembangan ekonomi digital bentuk pendampingan usaha juga diarahkan pada peningkatan kapasitas pemasaran berbasis teknologi informasi. Pelaku UMKM didorong untuk memanfaatkan media sosial, *marketplace* dan platform digital lainnya sebagai sarana promosi dan distribusi produk. Pendampingan pemasaran digital menjadi penting karena pola konsumsi masyarakat terus mengalami perubahan ke arah transaksi berbasis *online*. Dengan kemampuan pemasaran digital yang baik, UMKM tidak hanya mampu memperluas jangkauan pasar tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk melalui penguatan *branding* dan inovasi pemasaran (Pradiani, 2017).

Penataan Akses tahun 2025 berlangsung dari bulan Agustus – Desember 2025, Akses Reforma Agraria tahun 2025 Kalurahan Sendangsari diawali dengan penetapan lokasi. Kegiatan penataan akses tahun 2024 dilanjutkan pada tahun 2025 dengan tahap Fasilitasi Pendampingan Usaha yang dilaksanakan pada bulan Juni – September 2025. Kegiatan ini diawal dengan persiapan yaitu asesmen data hasil pemetaan sosial tahun 2024 selanjutnya ditindak lanjuti dalam rapat penetapan model Akses Reforma Agraria tahun 2025. Kalurahan Sendangsari merupakan kalurahan yang masuk dalam salah satu kalurahan dengan miskin ekstrem di Kulon Progo. Selain itu Kalurahan Sendangsari juga sudah dilakukan penataan aset berupa Prona dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pemetaan sosial dilakukan pada bulan September – Oktober 2025 dengan target 100 Kartu Keluarga (KK) di Kalurahan Sendangsari, hasil pemetaan sosial menunjukkan di Kalurahan Sendangsari terdapat potensi yang perlu dikembangkan antara lain pelaku UMKM kerajinan sabut kelapa, pelaku UMKM olahan pangan dan pelaku pembudidaya ikan lele. Pada penelitian ini meneliti salah satu dari ketiga potensi tersebut yaitu pelaku UMKM kerajinan sabut kelapa (Laporan Akhir Fasilitasi Pendampingan Usaha Tahun 2025).

Kerajinan sabut kelapa di Kalurahan Sendangsari merupakan salah satu UMKM berbasis sumber daya lokal yang memiliki potensi ekonomi dan sosial yang

besar, produk kerajinan ini memiliki nilai ekonomi karena mampu mengolah limbah pertanian menjadi produk bernilai jual. Pelaku UMKM di wilayah ini masih menghadapi berbagai kendala pengembangan usaha, keterbatasan akses permodalan, belum optimalnya akses terhadap pasar yang lebih luas serta masih rendahnya kapasitas manajerial dan pemasaran pelaku usaha (Soebiantoro & Haryanti, 2024). Dalam kondisi ini pendampingan usaha dalam program reforma agraria menjadi sangat penting sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, pendampingan yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam mengakses pasar dan permodalan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keberlanjutan (Anggara & Purnamawati, 2023). Meskipun telah dilakukan berbagai kegiatan pendampingan seperti pelatihan perizinan usaha, strategi pemasaran serta fasilitasi akses pembiayaan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan namun hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal. Akses permodalan masih terbatas pada sebagian pelaku usaha sementara akses pasar masih didominasi oleh pemasaran lokal dengan jangkauan yang terbatas (Suwantono dkk., 2025).

Program pendampingan dalam reforma agraria juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya lokal. Kerajinan sabut kelapa sebagai salah satu potensi usaha di Kalurahan Sendangsari memiliki nilai strategis karena mampu mengolah limbah pertanian menjadi produk ekonomis dan ramah lingkungan. Pengembangan usaha berbasis limbah organik sejalan dengan konsep ekonomi sirkular yang menekankan pada pemanfaatan kembali sumber daya agar memiliki nilai tambah ekonomi. Dengan demikian, pengembangan UMKM kerajinan sabut kelapa tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Nontji dkk., 2022).

Meskipun program pendampingan usaha telah dilaksanakan melalui pelatihan, fasilitasi legalitas usaha, strategi pemasaran dan akses pembiayaan hasilnya belum sepenuhnya optimal. Akses permodalan masih terbatas pada sebagian pelaku usaha sedangkan pemasaran masih didominasi pasar lokal dengan jangkauan yang relatif sempit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan akses masih lebih berorientasi pada aspek administratif dibandingkan

penguatan akses ekonomi yang mencakup keterhubungan dengan pasar dan lembaga pembiayaan. Akibatnya pendampingan belum mampu menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap pengembangan usaha UMKM. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan akses pasar dan akses permodalan merupakan dua kendala utama yang saling berkaitan dalam menghambat perkembangan UMKM. Namun sebagian besar kajian reforma agraria masih berfokus pada penataan aset sedangkan penelitian mengenai efektivitas penataan akses melalui pendampingan usaha, khususnya pada UMKM berbasis potensi lokal seperti kerajinan sabut kelapa, masih relatif terbatas. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan penataan akses reforma agraria melalui pendampingan usaha dalam meningkatkan akses pasar dan akses permodalan UMKM.

Berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kendala utama UMKM di Indonesia terletak pada keterbatasan akses permodalan dan akses pasar yang saling berkaitan. Keterbatasan akses permodalan menghambat peningkatan kapasitas produksi sementara keterbatasan akses pasar menyebabkan rendahnya penyerapan produk, kombinasi kedua faktor ini menciptakan lingkaran masalah yang sulit diputus sehingga UMKM cenderung stagnan dan sulit berkembang. Oleh karena itu intervensi kebijakan yang tidak secara simultan menyasar kedua aspek tersebut berpotensi tidak efektif dalam mendorong UMKM secara berkelanjutan (Haikal dkk., 2025). Sebagian besar kajian reforma agraria masih berfokus pada aspek normatif kebijakan dan penataan aset sementara kajian empiris menguji efektivitas penataan akses khusunya melalui pendampingan usaha dalam meningkatkan akses pasar dan permodalan UMKM, masih relatif terbatas. Selain itu penelitian yang mengkaji secara kontekstual pada level lokal terutam pada UMKM berbasis potensi sumber daya lokal seperti kerajinan sabut kelapa juga masih jarang dilakukan., kekosongan kajian tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang lebih spesifik dan kontekstual untuk memahami dinamika implementasi penataan akses tingkat lapangan (Arnowo, 2025)

Dengan demikian penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan reforma agraria tetapi juga untuk mengevaluasi secara kritis efektivitas penataan akses melalui pendampingan usaha dalam meningkatkan akses pasar dan

akses permodalan sebagai indikator utama keberhasilan pemberdayaan UMKM, fokus ini menjadi penting karena keberhasilan reforma agraria pada akhirnya harus diukur dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan semata – mata pada capaian adminsitratif program. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu meberikan kontribusi empiris dalam memperkuat pendekatan penataan akses yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata pelaku UMKM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat didefinisikan bahwa pelaksanaan penataan akses dalam program reforma agraria melalui pendampingan usaha di Kalurahan Sendangsari masih menghadapi berbagai kendala khususnya dalam hal akses pasar dan akses permodalan yang belum optimal, oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada :

1. Bagaimana pelaksanaan penataan akses reforma agraria melalui pendampingan usaha pada UMKM kerajinan sabut kelapa di Kalurahan Sendangsari?
2. Bagaimana capaian pendampingan usaha dalam meningkatkan kapasitas usaha, akses pasar dan kesiapan akses permodalan pelaku UMKM?
3. Apa saja kendala pelaksanaan pendampingan usaha dan kebutuhan tindak lanjut untuk mewujudkan kemandirian UMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria melalui pendampingan usaha pada UMKM kerajinan sabut kelapa di Kalurahan Sendangsari.
2. Menganalisis capaian pendampingan usaha dalam meningkatkan kapasitas usaha, akses pasar dan kesiapan akses permodalan pelaku UMKM kerajinan sabut kelapa di Kalurahan Sendangsari.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan usaha serta menganalisis kebutuhan tindak lanjut untuk mewujudkan kemandirian UMKM kerajinan sabut kelapa di Kalurahan Sendangsari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, khususnya terkait konsep reforma agraria penataan akses (*access reform*) dan pemberdayaan UMKM. Selain itu penelitian ini dapat memperkuat pemahaman teoritis mengenai hubungan antara kepemilikan aset agaria dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui akses pasar dan akses permodalan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai efektivitas pendampingan usaha sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

2. Manfaat Akademis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi imiah bagi pengembangan kajian di bidang pertanahan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan UMKM. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa khususnya terkait efektivitas penataan akses dalam reforma agraria.

3. Manfaat Sosial

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM kerajinan sabut kelapa di Kalurahan Sendangsari dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya akses pasar dan akses permodalan dalam pengembangan usaha. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih mampu mengoptimalkan potensi usaha yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

4. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pemerintah

      Sebagai bahan evaluasai dalam pelaksanaan penataan akses reforma agraria khususnya dalam meningkatkan efektivitas pendampingan usaha yang berorientasi pada penguatan akses pasar dan akses permodalan UMKM.

b. Bagi Lembaga Pendukung

Sebagai dasar dalam merancang program pendampingan dan pembiayaan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di lapangan.

c. Bagi Pelaku UMKM

Memberikan pemahaman dan referensi praktis dalam mengembangkan usaha khususnya dalam meningkatkan akses pasar dan akses permodalan secara berkelanjutan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas penataan akses dalam reforma agraria dan pemberdayaan UMKM.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui Pendampingan Usaha dalam Pemberdayaan UMKM Kerajinan Sabut Kelapa di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria melalui Pendampingan Usaha pada UMKM Kerajinan Sabut Kelapa di Kalurahan Sendangsari

   Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Sendangsari telah dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kalurahan Sendangsari, instansi pemerintah terkait, sektor swasta serta pelaku UMKM. Tahap persiapan diawali dengan pemetaan sosial dan identifikasi kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan program pendampingan. Tahap pelaksanaan diwujudkan melalui berbagai bentuk pendampingan, antara lain pelatihan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, legalitas usaha, inovasi produk serta pemberian bantuan sarana produksi berupa mesin pengayak *cocopeat* melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selanjutnya tahap evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap pemanfaatan bantuan, perkembangan usaha dan perubahan yang dirasakan oleh pelaku UMKM setelah mengikuti program pendampingan.

   Pelaksanaan penataan akses tersebut menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya berfokus pada aspek legalisasi aset, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan. Kolaborasi antarlembaga menjadi salah satu faktor yang mendukung terlaksananya program sehingga pendampingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki pelaku UMKM.

2. Capaian Pendampingan Usaha dalam Meningkatkan Kapasitas Usaha, Akses Pasar dan Kesiapan Akses Permodalan Pelaku UMKM

Program pendampingan usaha memberikan capaian yang positif terhadap pengembangan UMKM kerajinan sabut kelapa di Kalurahan Sendangsari. Pada aspek kapasitas usaha pendampingan telah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha termasuk pengelolaan keuangan, penentuan harga serta peningkatan kualitas produk. Bantuan mesin pengayak *cocopeat* juga memberikan dampak terhadap peningkatan efisiensi produksi sehingga kapasitas usaha menjadi lebih baik dibandingkan sebelum adanya pendampingan.

Pada aspek akses pasar pendampingan telah memperluas wawasan pelaku UMKM mengenai strategi pemasaran dan membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Meskipun demikian pemasaran produk masih didominasi oleh pelanggan tetap, pemasaran langsung dan jaringan dari mulut ke mulut. Pemanfaatan media digital sebagai sarana pemasaran juga belum dilakukan secara optimal sehingga perlu terus dikembangkan.

Sementara itu pada aspek kesiapan akses permodalan pendampingan belum memberikan bantuan modal dalam bentuk dana, namun program telah meningkatkan kesiapan pelaku UMKM melalui penguatan kapasitas usaha, peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan serta pemberian informasi mengenai akses pembiayaan. Bantuan sarana produksi yang diberikan juga menjadi aset produktif yang mendukung keberlanjutan usaha dan meningkatkan kesiapan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya pada masa mendatang.

3. Kendala Pelaksanaan Pendampingan Usaha dan Kebutuhan Tindak Lanjut dalam Mewujudkan Kemandirian UMKM

Meskipun program pendampingan memberikan berbagai manfaat,pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi hasil program, kendala tersebut meliputi keterbatasan jaringan pemasaran, belum optimalnya pemanfaatan pemasaran digital, keterbatasan modal usaha, ketersediaan bahan baku serta keterbatasan tenaga kerja ketika permintaan produk meningkat. Selain itu kerja sama

dengan mitra pemasaran maupun lembaga pembiayaan masih perlu diperluas agar pelaku UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, terutama dalam bidang pemasaran digital, inovasi produk, pengembangan jejaring usaha serta kemudahan akses permodalan. Oleh karena itu keberlanjutan program melalui sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kalurahan Sendangsari, pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemandirian UMKM secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam mendukung keberlanjutan Program Penataan Akses Reforma Agraria melalui pendampingan usaha pada UMKM kerajinan sabut kelapa di Kalurahan Sendangsari.

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

   Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat melaksanakan pendampingan usaha secara berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi pascaprogram sehingga perkembangan usaha pelaku UMKM dapat terus dipantau. Selain itu diperlukan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta sektor swasta untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas usaha dan membuka peluang akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

2. Bagi Pemerintah Kalurahan Sendangsari

   Pemerintah Kalurahan Sendangsari diharapkan terus berperan aktif dalam mendukung pengembangan UMKM melalui penyelenggaraan pelatihan pemasaran digital, pengembangan kewirausahaan serta fasilitasi promosi produk pada berbagai kegiatan pameran maupun kerja sama dengan pelaku usaha lainnya. Pemerintah kalurahan juga diharapkan mampu menjadi

penghubung antara pelaku UMKM dengan berbagai program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta.

3. Bagi Pelaku UMKM Kerajinan Sabut Kelapa

   Pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan hasil pendampingan yang telah diperoleh dengan terus meningkatkan kualitas produk, memperbaiki pengelolaan usaha serta mengembangkan strategi pemasaran yang lebih inovatif, termasuk melalui pemanfaatan media digital. Selain itu pelaku UMKM perlu memperkuat kerja sama antarkelompok usaha agar mampu memenuhi permintaan pasar dalam jumlah yang lebih besar serta meningkatkan daya saing produk.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai Penataan Akses Reforma Agraria dengan mengkaji dampak program dalam jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun keberlanjutan usaha UMKM. Selain itu penelitian dapat diperluas dengan melibatkan lokasi penelitian yang berbeda sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Penataan Akses Reforma Agraria di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Skripsi

Agustina, S. P., Endry, V. D., Saputri, R. T., & Zora, F. (2025). Strategi Pengembangan Umkm Di Sektor Ekonomi Kreatif Untuk Meningkatkan Daya Saing. 5, 5123–5135.

Ahfan, R., Asrori, & Sipahutar, H. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Pnpm Mp, Desa Peradaban, Csr Dan Posdaya (Konteks Lahirnya Uu No. 6 Tahun 2014)Community Empowerment On Prorampnpm Mp, Desa Peradaban, Csr And Posdaya(Context Of Theuu No. 6 Tahun 2014). 6, 89–100.

Amelia, N. J., Wahyuni, W., Dewi, S. R., & S, H. T. R. F. (2025). Bmt Sebagai Instrument Of Coproduction : Pemberdayaan Masyarakat Miskin Menuju Kemandirian Ekonomi. 9, 34031–34038.

Anggara, R., & Purnamawati, I. G. A. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Akses Permodalan Terhadap Keberlangsungan Umkm Di Kecamatan Karangasem. 549–558.

Arif, Z., Adhi, S. N., Nugroho, B. I., Murtopo, A. A., Surorejo, S., Syefudin, & Santoso, B. A. (2025). Pengembangan Kapasitas Usaha Klasterisasi Bawang Merah " Diversifikasi Produk Bawang Merah Dan Strategi Pemasaran Di Era Digitalisasi ." 3(3), 12–16.

Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria. Xxi(2), 83–96.

Arnita, D., & Yustati, H. (2024). Pemberdayaan Umkm Melalui Digital Marketing Dan Strategi Permodalan. 3(11), 1031–1038.

Arnowo, H. (2025). Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria Di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. 8(January), 113–128.

Astriani, M., Hidayat, S., Saputri, W., & Nuraini, N. (2021). Pendampingan Pengolahan Limbah Serabut Kelapa Menjadi Cocofiber Dan Cocopeat Di Desa Manggar Raya. Jurnal Solma, 10(3). Https://Doi.Org/10.22236/Solma.V10i3.7399

Bako, S. M., Melisa, Faisal, Muhammad, Nasution, H., & Nurbaiti. (2025). Sistem Pendataan Umkm Dan Implikasinya Dalam Peningkatan Akses Modal Dan

Perluasan Pasar. 18(2).

Bps, 2024. (2024). Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka.

Chambers, R. (2014). Rural Development : Putting The Last First.

Dwijayanti, A., Komalasari, R., Harto, B., Pramesti, P., & Alfaridzi, M. W. (2023). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Dan Pemasaran Pada Umkm Sablon Anggi Screen Di Era Digital. 6(2), 68–75.

Haikal, F. M., Murtiana, S., & Haetami. (2025). Strategi Pemberdayaan Umkm Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Strategies For Empowering Small And Medium Enterprises To Boost Indonesia's Economic Growth. 5(6), 1727–1736. Https://Doi.Org/10.53866/Jimi.V5i6.1064

Hasan, H., Haliah, & Fahdal, M. A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Umkm Sulawesi Dalam Implementasi Digitalisasi Umkm (Sulawesi Msme Community Empowerment In The Implementation Of Msme Digitization). 3(1), 43–50.

Hidayat, N., Wicaksono, I. A., Syams, A. S., Novianti, N. A., Redin, S., Karina, S. A., & Heriyanto, Z. M. (2025). Pempek Untuk Pemberdayaan Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Daerah Karang Rejo , Pendapatan Masyarakat Daerah Karang Rejo ,. 3(12).

Hilal, M. I., Bachtiar, R. R., & Pradita, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Sabut Kelapa Menjadi Produk Boneka Edukatif Di Kecamatan Kalipuro Banyuwangi. Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 7(3), 2205. Https://Doi.Org/10.31764/Jpmb.V7i3.19914

Indriani, Y. (2022). Peran Koperasi Dan Umkm Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif. 3–12.

Khansadina, D. (2024). No Titleελενη. Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls), 5(1), 70–80.

Lubis, M. A., Abdilla, M. F., & Berutu, S. S. (2024). Reformasi Agraria Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Pada Era Orde Lama Dan Orde Baru. 47–52.

Nontji, M., Galib, M., Amran, F. D., & Suryanti. (2022). Pemanfaatan Sabut Kelapa Menjadi Cocopeat Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat. 6(1), 145–152. Https://Doi.Org/10.30595/Jppm.V6i1.7581

Nugroho, F., Fauzi, A. A., Farras, F., & Mindiyarti, N. (2025). Pelatihan Dan Pemberdayaan Umkm Di Kota Pangkal Pinang Melalui Digital Marketing. 2023.

Nugroho, R. M. A., & Rahmat, P. N. (2024). Strategies To Accelerate The Access To Redistributed Land Indicated As Abandoned In Bilok Petung Village. Pertanahan, 94–108.

Pentanurbowo, & Al-Amin. (2025). Dinamika Pertumbuhan Umkm Dan Perdagangan Informal Dalam Memenuhi Kebutuhan Lokal Serta Lintas Batas : Kendala Akses Modal Dan Pasar. 3(5), 350–359.

Pradiani, T. (2017). Pengaruh Sistem Pemasaran Digital Marketing Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Hasil Industri Rumahan. 11, 46–53.

Purnawa, D., Rahmi, & Aditya, S. (2017). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah (Umkm) Di Kalurahan Malaka Sari, Duren Sawit. 1(1), 1–17.

Qur`Ainny, A., Sianipaar, Gloria Stevanie, N., Rozan, M. A., & Afifah, D. F. (2025). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Cileles Berdasarkan Perspektif Teori Pemberdayaan Oleh Robert Chambers. 8, 6252–6259.

Rahayu, Y. Citra, Lestari, P., Rahayu, E. L., & Budiawan, A. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Perekonomian Ibu Rumah Tangga Di Dusun Cintaharja Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing. 7, 201–208.

Risman, A., & Mustaffa, M. (2023). Literasi Keuangan Bagi Umkm:Laporan Keuangan Untuk Pengembangan Usaha Umkm. 20–27.

Saleh, A. R., & Utomo, H. (2018). 28among Makarti Vol.11 No.21, Juli 2018pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Di Pt. Inko Java Semarang. 11(21), 28–50.

Salfutra, R. D., Kusuma, W., Agave, A., & Situmorang, C. (2025). Reforma Agraria: Antara Konsep, Realita, Dan Problematika. 8(1), 1–8.

Sinaga, E. H., Massardy, E., & Yulianto, T. (2023). Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Penanganan Akses Reforma Agraria Di Desa Tengkurak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. 109–118.

Soebiantoro, & Haryanti, N. (2024). Peningkatan Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm). 1(2), 122–136.

Sopyan, A. A. P., & Sidipurwanty, E. (2024). Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan

Tanah Masyarakat : Pelajaran Dari Gugus Tugas Reforma Agraria Di Bangka Tengah. 7(May), 201–220.

Sudibyanung, Prasetyo, P. K., & Rahmadi, A. (2023). Peluang Penataan Akses Berdasarkan Potensi Wilayah (Studi Kasus Di Kalurahan Jatimulyo) Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo) Opportunities For Access Reform Based On Regional Potential (Case Study In Jatimulyo Village) Girimulyo District Kulon Progo. Jurnal Pertanahan, 13(2), 85–100.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.

Sugiyono, B. R. (2014). Studi Kelimpahan Populasi Thrips Sp. Pada Perlakuan Pengelolaan Hama Terpadu Dan Konvensional Pada Tanaman Cabai (Capsicum Annuum L.) Di Desa Bayem Kecamatan Kasembon Kapubaten Malang. 2(April), 67–78.

Suwantono, E., Tanto, Hartono, O., & Heriyanto. (2025). Peningkatan Akses Umkm Terhadap Permodalan Melalui Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana Pada Umkm Di Jalan Hos Cokroaminoto Pontianak. 1(11), 470–474.

Syafitri, W., & Indraswari, C. R. (2024). Pelatihan Akses Finansial Teknologi : Akselerasi. 6, 77–87.

Syahbani, F., Fadilah, I. R., Nurohim, R., Harto, Salsabila, D. S., Nurhaliza, S., Handayani, D. Fitri, Hilyati, I., Hamzah, Amel Husnul, L., Khairunnisa, F. Z., & Ardan, T. S. (2024). Pelatihan Digital Marketing Dan Pameran Umkm Sebagai Sarana Pengembangan Strategi Pemasaran : Studi Kasus Umkm Desa Tanjungsiang. 5(1), 259–266.

Tambunan, N. G., & Fitranita, V. (2025). Analisis Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Kebermanfaatan Yang Dirasakan Terhadap Keberlanjutan Penggunaan E-Wallet Pada Pelaku Umkm Di Indonesia Dimoderasi Oleh Risiko Keamanan. 10(204), 1671–1703.

Waryanta. (2016). Reforma Agraria : Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil Dalam Mendukung Ketahanan Pangan. September 2014.

Wijaya, S. Y., & Prawihatmi, C. Y. (2017). Akses Umkm Kuliner Terhadap Pembiayaan Mikro (Studi Di Pasar Semawis Kota Semarang). 38–50.

Wira, S., Salman, A., Aziz, A., Wahanisa, R., & Adymas, M. (2024). Reforma Agraria Dan Transformasi Mobilitas Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Dan Sosial

Masyarakat Desa. 1, 1–10.

Yapijimau. (2025). Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah (Studi Di Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Yustika, E. A. (2023). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Melalui Program Tiyuh Siaga Mandiri Guna Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulangbawang Barat).

Peraturan Perundang–Undangan

Peraturan Presiden. (2023). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. 181865.

Peraturan Pemerintah. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 086507.

Undang – Undang. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 1.

Uupa. (1960). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Buku

Laporan Akhir Fasilitasi Pendampingan Usaha Tahun 2025 Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo